

**BERITA ACARA**  
**EVALUASI INTERNAL SAKIP TAHUN 2022**  
**KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO**

<b>Hari /Tanggal</b>	: Rabu
<b>Tempat</b>	: 10 Januari 2024
<b>Agenda Rapat</b>	: Evaluasi Pelaksanaan Kinerja di Kecamatan Kanigaran Tahun 2024
<b>Peserta Rapat</b>	: 1. Camat Kanigaran 2. Sekretaris Kecamatan Kanigaran 3. Kasubag Tata Usaha Kecamatan Kanigaran 4. Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Kanigaran 5. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanigaran 6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kanigaran 7. plt. Kasi Pelayanan Kecamatan Kanigaran 8. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kanigaran 9. Seluruh Unsur Pelaksana Kecamatan Kanigaran

**Hasil Rapat:**

1. Capaian Anggaran

Anggaran Kecamatan Kanigaran pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 18.178.234.959 dan terealisasi sebesar Rp. 17.182.785.357,- atau sebesar 94,52%. Terdapat Anggaran sebesar Rp. 995.449.602,- yang tidak dapat terealisasi dikarenakan:

- Terdapat anggaran penunjang kantor yaitu berupa kelebihan belanja air dan listrik baik di Kelurahan maupun Kecamatan
- Terdapat sisa anggaran kegiatan seperti sisa Honor Narasumber, ATK kegiatan pada Kecamatan dan Kanigaran yang tidak dapat direalisasikan
- Terdapat usulan Musrenbang yaitu berupa RTLH an. SANATI dari Kelurahan Kanigaran yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak layak untuk sebagai penerima bantuan RTLH sebab yang bersangkutan telah keluar dari DTKS.
- Terdapat anggaran kegiatan Dana Kelurahan sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di 6 Kelurahan yang tidak dapat direalisasikan secara maksimal dikarenakan status hukum lahan belum sebagai Aset Pemerintah Kota.

2. Capaian Kinerja

a. Sasaran 1: **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan** dengan Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat* yang dicapai melalui :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target indikator program : Indeks Kepuasan Masyarakat 84 dan terealisasi 82,75% terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:
  - 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan, terdiri dari 7 Sub Kegiatan.

Pagu Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. **2.952.290.050,-** dengan realisasi sebesar Rp. **1.852.515.043** (95,05%).

## 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Presentase Penurunan Gangguan Keamanan dengan target 30% pada tahun 2024, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan

Capaian Kinerja terealisasi sebesar 30% dari target 30% pada tahun 2024 .Pagu Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp. **424.178.770** dengan realisasi sebesar Rp. **418.758.240,-** (98,72%).

## 3. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase

Capaian Kinerja Program Minimal 80% (realisasi 99%), pada Tahun 2023, terdiri dari 7 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 sub Kegiatan
- 4) Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan
- 5) Kegiatan Adminitasi Barang Milik Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terdiri dari 2 sub kegiatan
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terdiri Dari 4 Sub Kegiatan

Pagu anggaran program adalah sebesar Rp. **9.551.328.170,-** dengan realisasi sebesar Rp. **9.163.082.041-** (95,94%) .

- b. Sasaran 2: **Meningkatkan Kemampuan Kelompok dan Lembaga Masyarakat** dengan Indikator "Persentase Kelompok dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi" Target 40% (Realisasi 86,35%) yang dicapai melalui:

### 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Indikator Presentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif dengan target 88% (realisasi 90%) pada tahun 2022, terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 12 Sub Kegiatan
- 2) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 Sub Kegiatan

- Pagu Program adalah sebesar Rp. **4.029.302.180,-** dengan realisasi Rp. **3.525.801.873,-** (87,50%). Realisasi anggaran cukup baik hal ini dikarenakan kegiatan Dana Kelurahan sebagian sudah dapat direalisasikan oleh Kelurahan dimana untuk Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di

6 kelurahan yang tidak dapat direalisasikan disebabkan penolakan warga terhadap tanah yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo.

- c. Menindaklanjuti Berita Acara Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Kecamatan Kanigaran Nomor: 700/01-TIM IV/425.302/2023 tanggal 15 Agustus 2023 telah ditindaklanjuti beberapa hal antara lain:
  1. Pada Website Kecamatan Kanigaran telah mengupdate data SAKIP terbaru
  2. IKU Kecamatan Kanigaran telah diselaraskan dengan Perwali IKU
  3. Dokumen Renstra telah direviu secara berkala
  4. Agar dilakukan pendalaman yang memadai mulai dari aspek perencanaan pengukuran, pelaksanaan dan pelaporan
- d. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja %Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi, realisasi Tahun 2021 , 2022 dan 2023 jauh melampaui target yang telah dilaksanakan, hal ini dikarenakan kelompok dan lembaga kemasyarakatan baik di Kelurahan dan Kecamatan telah berperan sangat aktif dalam pembangunan di Kecamatan, sehingga pada Renstra Tahun 2025-2026 perlu merubah target indikator.
- e. Pada Indikator Nilai Tata Kelola Pemerintahan untuk Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, Pada Tahun 2022 tidak dapat diukur dan tidak menjadi IKU Kecamatan Kanigaran kembali, hal ini disebabkan Aplikasi Si Jinggo dari Bagian Pemerintahan yang merupakan alat untuk mengukur capaian indikator sudah tidak aktif.

Adapun Capaian Realisasi Kinerja dapat dilihat pada table berikut:

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Proyeksi					Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	% Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi			25%	30%	35%	40%	45%	25%	65,38 %	85,71 %	86,35 %	0	25%	30%	35%	40%	45%			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82,5	83%	83,5	84	84,50	81,96	0	82,75	0	0	82,5	83	83,5	84	84,50			
3	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			250	255	0	0	0	306,05	309,67	0	0	0	250	255	0	0	0			
4	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan			-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100			

### 3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Diperlukan penyesuaian target IKU untuk Indikator %Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi pada Perubahan Renja Tahun 2023
- Perubahan parameter penilaian Prioritas kegiatan
- Efisiensi alokasi belanja sesuai peruntukan dan kegunaan
- Penambahan alokasi anggaran pada sub kegiatan yang tidak mencapai target.
- Merencanakan dan menata kamus musrenbang dengan baik agar usulan dari masyarakat dapat diakomodir sesuai prioritas dan anggaran yang cukup,
- Melakukan koordinasi dan Pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ( melalui Bagian Hukum Setda Kota Probolingg) serta Reviu ke Inspektorat Kota Probolinggo
- Koordinasi lebih intens dengan 3 Pilar agar kejadian gangguan keamanan dan ketertiban di KEcamatan Kanigaran menurun
- Melakukan Verifikasi dan cek lapangan kesesuaian usulan Musrenbang/Pokir sebelum dimasukkan pada Renja di SIPD.

Notulis

Kasubag Program dan Keuangan



DWI SEPTINA ARIFAH, S.Sos, M.AP

19830913 200604 2 014

DOKUMENTASI

